ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2021. 08(02): 253-267 e-ISSN: 2528-5939
Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2021.008.02.08

ADAPTATION PATTERNS ON COASTAL COMMUNITIES OF THE "*GOPLA*" FOREST MANAGEMENT PHENOMENON AT TASIKMADU VILLAGE, TRENGGALEK REGENCY

POLA ADAPTASI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP FENOMENA PENGELOLAAN HUTAN *"GOPLA"* DI DESA TASIKMADU, KABUPATEN TRENGGALEK

Normansyah Fuad[*1)], Keppi Sukesi[2)], and Edi Susilo[3)]

[1, 2)] Agriculture Faculty, Brawijaya University, Veteran Street, Malang
[3)] Fisheries and Marine Science Faculty, Brawijaya University, Veteran Street, Malang

Received: December 23, 2020/ Accepted: April 25, 2021

ABSTRACT

Gopla is a coastal community adaptation phenomenon that occurs in the Prigi Beach Area which was pioneered by Mr. Paniyo (Gopla). This phenomenon is a change in deviant behavior where people use forest land that does not belong to them for personal gain. This adaptation is triggered by the increase in the necessities of life caused by the economic crisis and the reduction in basic income from the fisheries and agriculture sectors, which are his main livelihoods. This study has the objectives of 1) knowing the adaptation of coastal communities within the scope of community interaction with forest ecosystems, 2) formulating adaptation patterns that occur in these coastal communities. This study uses a qualitative method with a case study approach. From this research, it was found that the adaptation carried out in the community turned out to include adaptation to the ecosystem, socio-culture, and economic system which are interrelated.

Keywords: adaptation, behavior change, forest management, gopla, coastal communities.

ABSTRAK

Gopla merupakan sebuah fenomena adaptasi masyarakat pesisir yang terjadi di Kawasan Pantai Prigi yang dipelopori oleh Bapak Paniyo (Gopla). Fenomena ini merupakan perubahan perilaku yang menyimpang, dimana masyarakat memanfaatkan lahan hutan yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi. Adaptasi ini dipicu karena meningkatnya kebutuhan hidup yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan berkurangnya pendapatan pokok dari sektor perikanan dan pertanian yang merupakan mata pencaharian utamanya. Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain 1) mengetahui adaptasi masyarakat pesisir di dalam lingkup interaksi masyarakat dengan ekosistem hutan, 2) merumuskan pola adaptasi yang terjadi pada masyarakat pesisir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil dimana adaptasi yang dilakukan pada masyarakat ternyata meliputi adaptasi terhadap ekosistem, sosial-budaya, dan sistem ekonominya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: adaptasi, perubahan perilaku, pengelolaan hutan, gopla, masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang terdiri dari kumpulan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman terutama pepohonan yang menempati wilayah yang luas yang dapat dimanfaatkan juga sebagai lahan pertanian. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang mempunyai manfaat bagi manusia yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sangat bergantung terhadap jasa ekosistem hutan, seperti menyediakan air bersih, pangan, kayu dan lain sebagainya.

[*] *Corresponding author: Normansyah Fuad, syah.fuad89@gmail.com*
Sociology Master Program, Faculty of Agriculture, Brawijaya University, Veteran Street, Malang 65145, Indonesia

Cite this as: Fuad, N *et al.* (2021). Adaptation Patterns on Coastal Communities of the "*Gopla*" Forest Management Phenomenon at Tasikmadu Village, Trenggalek Regency. ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal. 08(02): 253-267
Available online at http://ecsofim.ub.ac.id/

Eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan secara besar-besaran pada masa awal reformasi di Kawasan Hutan Teluk Pantai Prigi terjadi karena peraturan otonomi daerah, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hajat hidup masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan tersebut hanya mengatur sistem pemerintahan, yang artinya hanya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah namun belum memperhatikan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dengan belum adanya kejelasan tersebut, otonomi daerah pada saat itu malah memperparah ekploitasi hutan (Nababan, 2004). Selain itu, faktor lain yang mendorong eksploitasi hutan di Teluk Pantai Prigi adalah meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat pesisir yang timbul akibat krisis ekonomi (Safitri, 2010) dan kesalahan pemahaman tentang reformasi pada saat itu, dimana mereka beranggapan bahwa masyarakat dapat bebas memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah (Susilo, 2007), sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan memanfaatkan sumber daya hutan. Selain itu, masyarakat pesisir juga memanfaatkan lahan hutan dan dikelola menjadi semi perkebunan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Paniyo atau yang mempunyai julukan *Gopla*. Bapak Paniyo atau Gopla merupakan orang yang pertama kali melakukan pengelolaan hutan milik Perum Perhutani. Perilaku ini pada awalnya merupakan perilaku menyimpang karena memanfaatkan suatu areal yang bukan miliknya.

Latar belakang masyarakat pesisir di Teluk Prigi umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani sawah tanpa pernah melakukan pengelolaan hutan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan pada masa orde baru merupakan aktivitas ilegal, sehingga masyarakat tidak berani untuk mengambil hasil hutan maupun memanfaatkan lahan hutan untuk berkebun. Pada awal pengelolaan hutan, masyarakat cenderung mengolah lahan secara asal-asalan sehingga berpotensi memperparah kondisi lahan hutan. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ternyata dalam pengelolaannya sangat sulit untuk menerapkan pengelolaan yang ramah lingkungan (Iqbal, 2018). Bertujuan untuk membantu meringankan masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar areal hutan, pada Tahun 2008 dijalankanlah program Pengelolaan Bersama Masyarakat (PHBM) serta dibentuk juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Tasikmadu. LMDH dibentuk untuk tujuan sebagai mediator antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan (Tim Project Cifor dan Fahutan UGM, 2018). Dengan adanya program ini maka juga menandai pelegalan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Desa Tasikmadu.

Perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat pesisir merupakan sebuah gambaran dari perubahan pola pikir yang diakibatkan oleh berubahnya keadaan dan kondisi lingkungan. Hal ini dapat merubah persepsi masyarakat pesisir terhadap ekosistem hutan, sosial budaya, dan sistem ekonomi. Perubahan yang terjadi pada masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses yang terjadi secara terus-menerus, meski begitu setiap masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidak mengalami perubahan yang sama dan banyak aspek-aspek yang mempengaruhi (Hatu, 2011).

Menurut Hafizianor (2016) perubahan lingkungan biofisik dan lingkungan sosial memicu masyarakat untuk beradaptasi agar dapat bertahan hidup dalam kondisi tersebut.

Perilaku adaptasi yang dialami oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Demak mempunyai kemiripan dengan adaptasi yang dilakukan masyarakat di Pesisir Pantai Prigi dalam melakukan pengelolaan hutan, yaitu sama-sama melakukan inovasi untuk lepas dari permasalahan yang terjadi. Melakukan implikasi kebijakan yang berkaitan dengan strategi adaptasi dengan memperbaiki ekosistem (Marfai dkk., 2018). Lalu fase selanjutnya, masyarakat mulai memperbaiki cara pengelolaan sumber daya hutan, salah satunya dengan memperbaiki ekosistem hutan dengan mulai melakukan restorisasi pada tempat-tempat yang awalnya dianggap sebagai tempat mata air. Selanjutnya, membuat strategi untuk memperbaiki pengelolaan lahan hutan dengan mulai menggunakan pupuk organik untuk keberlangsungan pengelolaan hutan.

Menurut Tamba dkk. (2015), perubahan fungsi hutan secara otomatis mempengaruhi padangan masyarakat di sekitar hutan mengenai nilai dan pemanfaatannya. Selain itu juga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi jenis pekerjaan dan adaptasi inovasi terhadap perubahan fungsi hutan tersebut. Adapun beberapa aktivitas masyarakat yang mengalami penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi diantaranya: (1) penyesuaian perilaku masyarakat terhadap kegiatan adat istiadat, (2) penyesuaian aktivitas masyarakat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan religinya, dan (3) penyesuaian aktivitas masyarakat terhadap kegiatan bersosial dengan masyarakat dalam lingkungannya. Tamba dkk. (2015) juga menjelaskan bahwa perubahan masyarakat yang menjurus kepada penyesuaian dalam nilai sosial, norma sosial, dan adat istiadat dipicu oleh alih fungsi lahan hutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis adaptasi yang terjadi pada masyarakat pesisir yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan di Desa Tasikmadu. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut peneliti merumuskan dan menjelaskan tentang pola adaptasi yang terjadi pada masyarakat tersebut sehingga mengetahui proses adaptasi masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019 yang berlokasi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskripsi berupa kalimat atau kata tertulis maupun lisan dari masyarakat yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti perlu untuk mengetahui secara mendalam tentang adaptasi yang terjadi di masyarakat pesisir yang melakukan pengelolaan hutan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball*. Dimana data diambil dari sejumlah kasus yang berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain sampai data yang didapat jenuh atau sudah tidak ditemukan data baru. Metode analisis data yang digunakan berupa pembuatan deskripsi detail tentang kasus tersebut dan settingnya.

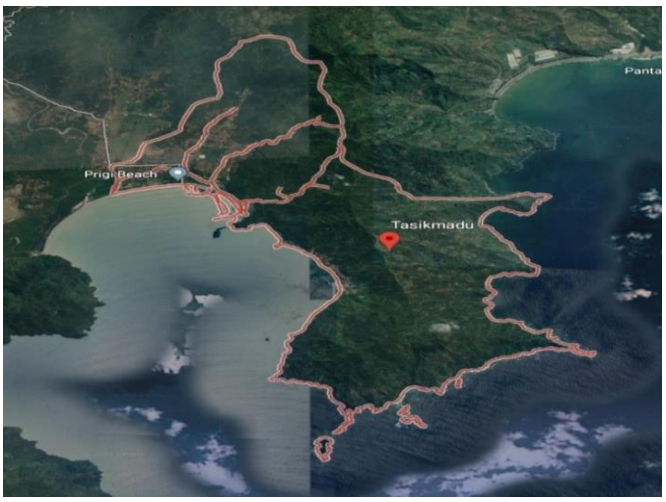

Gambar 1. Peta Desa Tasikmadu Dari Atas
Sumber: Google Earth (2020)

Validasi data menggunakan teknik triagulasi, yaitu peneliti melakukan pengecekan data ke informan yang sama pada awal wawancara, dan setelah informan menjelaskan topik yang lain peneliti kembali melakukan pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya dengan maksud mendapatkan data yang valid (Sugiono, 2015). Analisis data untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan masyarakat pesisir serta perumusan pola adaptasinya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui proses perubahan secara ekosistem, sosial-budaya dan sistem ekonominya. Analisis kualitatif memiliki 3 (tiga) pokok alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian untuk mengurangi kesalahan dalam proses pemilihan, penyederhanaan, penjabaran, dan mengkonversi data dari tempat penelitian. Selanjutnya, penyajian data digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi dan selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan dari data-data tersebut (Milles dan Huberman, 1992; Yuliati, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi Masyarakat Pengelola Hutan "Gopla" di Desa Tasikmadu

Gopla pada awalnya merupakan perilaku menyimpang karena menggunakan lahan milik hutan milik Perum Perhutani yang dipelopori oleh Bapak Paniyo, yang juga mempunyai panggilan *Gopla*, lalu dengan berjalannya waktu sebutan *gopla* dipakai oleh masyarakat yang meniru perilaku Bapak Paniyo dalam artian ikut serta dalam pengolah lahan hutan tanpa izin. Pengelolaan hutan "*gopla*" ini mulai marak terjadi pada tahun 1998, dimana pada waktu itu banyak lahan hutan yang kosong karena ekploitasi sumber daya hutan yang dilakukan secara besar-besaran oleh pengusaha dan masyarakat. Eksploitasi tersebut terjadi diawali dengan peraturan tentang otonomi daerah yang pada saat itu menyebabkan ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD tersebut, Pemerintah Daerah berupaya dengan salah satunya mengeksploitasi sumber daya hutan dengan

pemberian izin HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan), IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), dan lain sebagainya tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya hutan yang ada (Nababan, 2004). Kebijakan tersebut yang mengakibatkan sebagian ekosistem hutan di wilayah Teluk Pantai Prigi mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga areal hutan yang dulunya lebat dengan tanaman kayu menjadi lahan kosong (Susilo, 2017).

Krisis ekonomi menurut masyarakat juga ikut yang menyebabkan meningkatnya himpitan ekonomi pada masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi menengah kebawah yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani sawah, ini yang kemudian memicu masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan yang kosong tersebut untuk membantu meringankan beban hidup walaupun pada saat itu pemanfaatan lahan hutan masih ilegal dan dilarang. Sebagian besar dari masyarakat pada saat itu menanam tanaman palawija dan padi gogo karena paling mudah dalam perawatannya, selain itu apabila menanam tanaman industri terjadi kekhawatiran bahwa tanaman tersebut akan dirusak oleh mandor hutan.

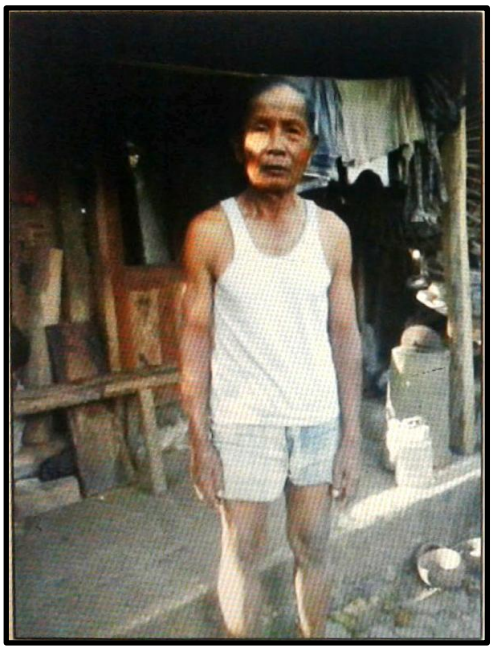

Gambar 2. Foto Bapak Paniyo atau Gopla
Sumber: Susilo (2007)

Lewin *dalam* Borden dan Horowitz (2008) berpendapat bahwa suatu perilaku sosial dipengaruhi oleh peran dari interaksi situasi dan karakteristik di dalam suatu masyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat pesisir di wilayah Teluk Pantai Prigi, dimana perilaku mereka dipengaruhi oleh keadaan kondisi pada saat itu. Menurut Smit dan Wandel (2006), adaptasi pada masyarakat merupakan perwujudan dari perubahan yang dapat terbentuk dari aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang saling berkaitan satu dengan yang lain (Panjaitan, 2016).

Fenomena *gopla* dapat golongkan sebagai suatu kearifan lokal. Qandhi (2012) *dalam* Ariyanto dkk. (2014), berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan suatu proses yang disebabkan oleh hubungan manusia dengan lingkungannya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapat ini sesuai dengan fenomena *gopla* yang terjadi pada masyarakat pesisir Teluk Prigi. Dalam fenomena *gopla* ini, masyarakat merubah mata pencaharian mereka.

Adaptasi Masyarakat Terhadap Ekosistem Hutan

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ternyata mengubah sudut pandang dan persepsi terhadap ekosistem hutan. Kurangnya pengenalan dan pengetahuan terhadap ekosistem hutan memberikan anggapan bahwa ekosistem hutan tidak mudah rusak atau dapat bertahan lama. Tetapi anggapan atau persepsi tersebut berlahan-lahan luntur karena terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Dengan fenomena-fenomena alam tersebut mereka mulai berpikir dan merenung, sehingga memunculkan kesadaran masyarakat pesisir bahwa ekosistem hutan telah mengalami kerusakan. Setelah itu, masyarakat sekitar berupaya untuk menanam tanaman industri, seperti sengon, akasia, cengkeh, dan tanaman buah seperti durian dengan tujuan untuk menghidari bencana alam yang diakibatkan karena rusaknya ekosistem hutan. Kapasitas adaptif merupakan kapabilitas dari suatu organisme untuk menyesuaikan diri agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi dan memanfaatkan peluang untuk menghadapi dampak atau akibat yang terjadi (Galopin, 2006; Panjaitan dkk., 2016).

Terkait dalam kegiatan pengelolaan hutan seperti penggunaan pupuk, ternyata juga terjadi perubahan penggunaan jenis pupuk yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Menjelaskan Tentang Penggunaan Jenis Pupuk Menurut Latar Belakang Mata Pencaharian Masyarakat Pengelola Hutan

No.	Latar Belakang	Pupuk anorganik	Pupuk organik dan anorganik	Pupuk organik	Jumlah
Sebelum Pengelolaan Hutan Dilegalkan					
1	Nelayan	11	2		13
2	Petani	3	4	1	8
3	Wiraswasta	5			5
Sesudah Pengelolaan Hutan Dilegalkan					
1	Nelayan	3	9	1	13
2	Petani		7	1	8
3	Wiraswasta	1	4		5

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis pupuk yang digunakan masyarakat mengalami perubahan pada saat sebelum dan sesudah pelegalan pengelolaan hutan. Pada saat pengelolaan hutan belum dilegalkan mayoritas masyarakat menggunakan pupuk anorganik. Menurut narasumber, penggunaan pupuk anorganik saja dapat merusak tanaman seperti penyakit daun keriting, selain itu penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan tanah. Akhirnya, masyarakat di lokasi penelitian juga menggunakan pupuk organik seperti kompos dari kotoran hewan ternak atau tanaman perdu.

Masyarakat dalam pengelolaan hutan juga berusaha untuk melakukan restorasi sumber mata air, seperti menanam tanaman yang dapat menyimpan air seperti durian, bendo, dan lain-lain pada tempat yang dulunya merupakan daerah mata air. Dengan pengalaman-pengalaman yang mereka lalui pada masa lampau, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan. Kemampuan masyarakat dalam memahami fungsi lahan dapat dilihat pada Gambar 3.

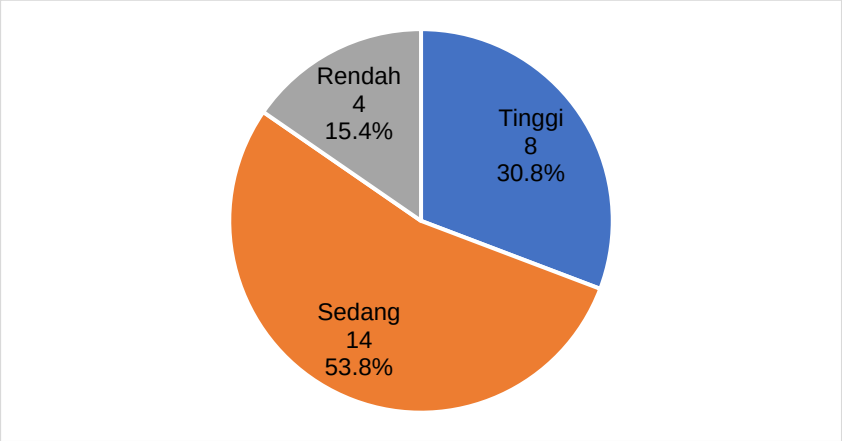

Gambar 3. Kemampuan Responden dalam Memahami Fungsi Hutan

Pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa 8 atau 30,8% responden mempunyai tingkat pemahaman fungsi hutan dengan baik, sedangkan 14 atau 53,8% responden mempunyai tingkat pemahaman yang sedang tentang fungsi hutan, sedangkan hanya 4 atau 15,4% responden mempunyai tingkat pemahaman yang rendah terhadap fungsi hutan. Responden-responden tersebut mengetahui fungsi hutan dari pengalaman serta informasi dari petani penggarap hutan lainnya. Walaupun demikian responden berharap diadakan penyuluhan terhadap pengelolaan hutan.

Perubahan-perubahan pandangan atau persepsi yang terjadi pada masyarakat mencerminkan bahwa mulai memahami kompleksitas dan memberikan gambaran-gambaran tentang lingkungannya (Marten, 2001). Persepsi merupakan suatu proses dalam diri untuk mengenal, mengetahuai, dan mengetahui suatu obyek. Pada proses ini sensitivitas pada seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya terlihat. Cara seseorang memandang atau menilai sesuatu dapat menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi tersebut (Listyana dan Hartono, 2015).

Adaptasi Sosial-Budaya

Menurut Sonya dkk (2019), adaptasi manusia terhadap ekosistemnya tidak hanya terjadi karena pengaruh faktor biogeofisik, tetapi juga sosial-budaya. Perbedaan dalam tradisi, persepsi, sistem sosial, dan lain sebagainya akan membentuk strategi adaptasi yang berbeda juga. Lingkungan dan budaya merupakan suatu kesatuan, dimana keduanya saling mempengaruhi. Terdapat beberapa perubahan terkait dengan aspek sosial-budaya yang diakibatkan oleh pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang masyarakat sekitar lakukan dapat melunturkan kepercayaan tentang tempat-tempat yang dianggap “wingit” atau mistis. Hal ini dikarenakan oknum-oknum yang melakukan penebangan pada pepohonan tersebut tidak mengalami gangguan-gangguan mistis. Selain itu dengan pengelolaan hutan, juga mempengaruhi stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat, yang awalnya mereka hanya melihat suatu tingkatan stratifikasi berdasarkan kekayaan seperti juragan darat dan tuan tanah; orang-orang yang memiliki jabatan seperti PNS dan pejabat publik; dan orang terpandang seperti pemuka agama dan tokoh masyarakat. Seiring berjalannya pengelolaan hutan ini, stratifikasi juga ditentukan dari pengetahuan dalam mengelola lahan hutan.

Masyarakat pengelola hutan juga menggunakan peralatan-peralatan yang sebelumnya tidak pernah digunakan seperti mesin pemotong rumput, gergaji mesin, dan juga motor yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk melalui jalur di areal hutan, peralatan-peralatan tersebut berguna untuk menunjang kebutuhan dalam pengelolaan hutan. Munthe (2007) berpendapat bahwa penggunaan mesin atau alat pertanian modern merupakan bentuk modernisasi di bidang pertanian. Wijayanto dkk (2017), menjelaskan penggunaan peralatan dan teknologi baru ini dipengaruhi oleh perubahan mata pencaharian masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan efisiensi pekerjaan yang baru. Dari perubahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat pesisir mengarah pada masyarakat modern, dimana menurut Yuliati (2011) mengemukakan bahwa masyarakat modern memiliki ciri-ciri diantaranya dalam melakukan pengambilan keputusan lebih didasarkan pada pola pikir ilmiah atau rasional daripada mempercayai hal gaib, intuitif, dan tradisi.

Pengelolaan hutan ternyata juga merubah perilaku atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat pesisir. Seperti yang dimaksud oleh Rohadi dkk. (2016), adaptasi tidak hanya penyesuaian tubuh secara internal tetapi juga termasuk perubahan perilaku guna menanggapi perubahan lingkungan yang terjadi. Dimana pada musim paceklik ikan dan pada saat musim kemarau, nelayan dan petani sawah lebih banyak menganggur. Namun melalui pengelolaan hutan, nelayan dan petani dapat merawat tanaman yang ditanam di lahan hutan kelolaannya. Aktivitas yang dilakukan nelayan dengan mencari mata pencaharian di luar sektor perikanan merupakan salah satu adaptasi yang dilakukan oleh komunitas nelayan (Mustaqim, 2018).

Perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan sosial, dikarenakan perubahan sosial terjadi karena sistem kemasyarakatan. Perubahan sosial sendiri bukan sesuatu yang direncanakan dan terdapat rangkaian yang bersifat tetap pada jangka waktu yang lama (Bainar dkk., 2006). Perubahan sosial terjadi pada saat suatu masyarakat atau individu di dalamnya mulai meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang lama dan mulai menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial dinilai sebagai sebuah bentuk yang mencakup seluruh kehidupan pada suatu masyarakat, baik pada level individu maupun kelompok (Salim, 2002; Nurkhalis dan Zulfadhli, 2017).

Adaptasi Sistem Ekonomi

Menurut Yuliati (2011) untuk melihat sistem ekonomi berubah dalam dunia pertanian dapat dilihat dari pola tanamnya. Berubahnya pola tanam atau jenis tanaman dapat mengubah masa panen dan nilai ekonomisnya. Pada awal pengelolaan hutan seperti yang dibahas di atas, masyarakat menanam jenis tanaman palawija dan padi gogo yang sebagian besar dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri. Jarang dari masyarakat yang menjual kepada tengkulak, kecuali mempunyai lahan olahan yang luas. Dengan berubahnya pola tanam dengan sistem tumpang sela (*intercropping*) dan jenis tanaman yang ditanam, seperti tanaman buah berupa alpukat, durian, dan lain-lain, dan tanaman industri seperti kayu sengon dan cengkeh secara langsung juga menyebabkan perubahan sistem ekonominya. Dengan menggunakan sistem tumpang sela dengan menanam tanaman palawija diantara tanaman buah dan tanaman industri pada sebagian pengelola,

hasilnya masyarakat mendapatkan penghasilan jangka pendek dengan tanaman palawija dan penghasilan jangka panjang dengan tanaman buah dan tanaman industri. Perubahan pola tanam ternyata juga tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat pesisir. Selain itu, menurut Putri dkk. (2018), meningkatnya kebutuhan rumah tangga mempengaruhi perubahan komoditas, dimana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan *cash income* yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Hal ini yang mendorong pengelola hutan untuk beralih komoditas yang semula hanya menanam padi gogo dan tanaman palawija ke tanaman yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi, seperti tanaman buah dan tanaman industri.

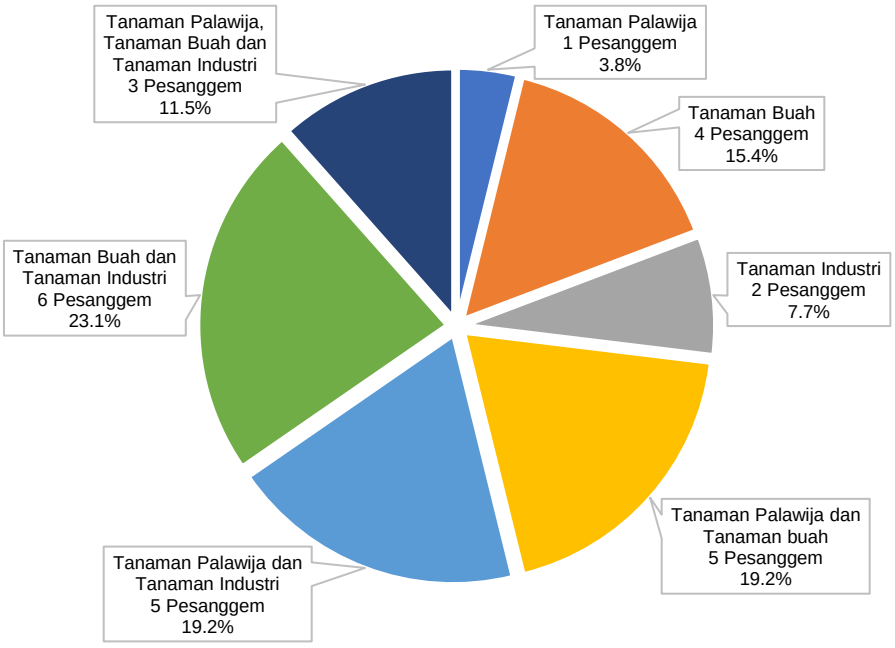

Gambar 4. Jenis Tanaman yang Ditanam oleh Responden

Pada Gambar 4 dapat diketahui bahwa 23,1% atau 6 responden menanam lahan hutannya dengan tanaman buah dan industri. Lalu 19,2 % atau 5 responden menanam tanaman palawija dan tanaman industri dan 19,2 atau 5 responden lainnya menanam tanaman palawija dan tanaman buah. Kemudian 15,4 % atau 4 responden menanam hanya tanaman buah di lahan hutan mereka dan 11,5% atau 3 responden menanam tanaman palawija, tanaman buah dan tanaman industri. Selanjutnya 7,7% atau 2 responden menanam tanaman industri saja dan sisanya 3,8% atau 1 responden hanya menanam tanaman palawija saja di lahan hutan “miliknya”.

Sistem pengupahan tenaga kerja juga mengalami perubahan, pada saat awal pengelolaan hutan, sebagian dari masyarakat menerapkan sistem bagi hasil seperti pengolahan lahan pertanian sawah. Seiring berjalannya waktu serta perubahan komoditas, masyarakat tidak lagi menggunakan sistem bagi hasil, namun menggunakan sistem pengupahan upah harian seperti sistem pengupahan tenaga kerja yang diterapkan pada areal tegal, dimana tenaga kerja menentukan tarif untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Sistem jual-beli yang berlaku khususnya untuk hasil hutan juga mengalami perubahan dimana terdapat sistem jual-beli baru, yaitu sistem jual-beli borongan setiap pohon. Sistem jual-beli borongan ini seperti sistem *ngijo*, tetapi dalam proses pra-panen dan pasca

panen semua dikerjakan oleh pembeli tetapi pada saat pembayaran disesuaikan pada saat buah sudah siap panen. Lalu terdapat sistem borongan, dimana jual beli dengan sistem borongan ini dilakukan pada musim panen dengan hasil yang melimpah yang membuat petani kesulitan membawa hasil hutannya sehingga hasil tersebut akan dibawa oleh penjual. Selain itu, dengan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir secara langsung dapat meningkatkan penghasilan mereka. Dengan adanya pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir jelas meningkatkan kesejahteraan mereka, karena mendapatkan lahan garapan secara gratis.

Deskripsi sebelumnya tentang adaptasi masyarakat menjelaskan bahwa adaptasi masyarakat sesuai dengan teori tindakan rasional yang dipaparkan oleh Max Webber, dimana suatu tindakan masyarakat didasari pada rasionalisasi yang mengarah pada akal, logika, keteraturan, kalkulasi, dan koherensi (Chalcraft *et al.*, 2008). Beberapa konsep tindakan rasionalitas sebagai berikut:

a. Konsep dari tindakan rasionalitas merupakan inti dari kajian obyektif, dimana tindakan obyektif merupakan suatu tindakan bisa dipahami oleh orang lain. Ini yang menyebabkan tindakan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat (Campbell, 1981; Johnson, 1981). Tindakan rasional ini juga terjadi dengan melakukan evaluasi secara sadar dan ditimbang aspek baik dan buruknya (Yuliati, 2011).
b. Menurut Webber terdapat 4 (empat) bentuk tindakan individu, antara lain: (a) tindakan rasional instrumental, dimana tindakan ini didasari oleh keinginan yang ingin dicapai; (b) tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan ini jika tujuan yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang bersifat mutlak; (c) tindakan tradisional, merupakan suatu tindakan yang terjadi karena kebiasaan masyarakat; (d) tindakan afektif, tindakan ini merupakan tindakan spontan dan biasanya tidak diikuti dengan rasionalisasi (Wrong, 1970; Rossides, 1978; Ritzer dan Goodman, 2004; Yuliati, 2011).

Pola Adaptasi Masyarakat Pesisir

Menurut Suyono (1985), pola merupakan suatu rangkaian dari unsur-unsur yang sudah menetap mengenai suatu fenomena dan dapat dijadikan sebagai contoh dalam menggambarkan fenomena itu sendiri. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Susilo (2017) bahwa pola adaptasi manusia yang terjadi, khususnya masyarakat pesisir yang mengelola hutan di Desa Tasikmadu mengacu pada teori dinamika adaptif, dimana aktor atau pelaku secara sadar berkembang dan terus mengalami perubahan untuk bisa bertahan serta memperbaiki hidupnya. Masyarakat pesisir melakukan adaptasi dengan berusaha mengembangkan diri agar dapat keluar dari tekanan ekonomi yang menghimpit pada saat itu. Selain itu, mereka juga berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya dari pengelolaan hutan. Pada kasus pengelolaan hutan dalam fenomena "*gopla*" dimulai karena adanya tekanan hidup pada masyarakat pesisir, khususnya yang mempunyai tingkat ekonomi menengah ke bawah yang pada saat itu tidak mempunyai penghasilan yang cukup.

Adaptasi yang dilalui oleh mereka juga tidak terlepas dari persepsi mereka terhadap ekosistem hutan dan faktor pendorong seperti kesalahan dalam memahami arti reformasi secara benar serta adanya akses untuk memanfaatkan lahan hutan. Guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat,

masyarakat menerapkan strategi ekologi dengan cara mengolah dan memanfaatkan sumberdaya lain yang dapat mereka akses (Putri dkk., 2018). Selain pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat ini meniru yang dilakukan oleh Bapak Paniyo, Bennet (1976) berpendapat bahwa meniru merupakan salah satu bentuk dari adaptasi yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya adaptasi yang terjadi pada masyarakat pesisir terjadi pada saat mereka mulai meniru perilaku yang dilakukan oleh Bapak Paniyo, dimana mereka mulai melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan mereka. Setelah itu terjadilah adaptasi-adaptasi lainnya yang berhubungan dengan ekosistem hutan, sosial-budaya, dan sistem ekonomi yang ada di dalam masyarakat pesisir.

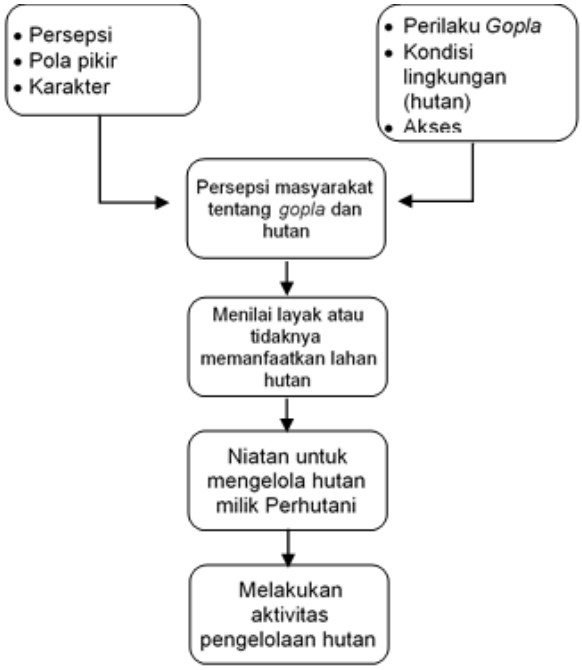

Gambar 5. Alur Pemikiran Masyarakat Pesisir terhadap Fenomena Pengelolaan Hutan

Pada Gambar 5, diketahui bahwa terdapat faktor-faktor internal yaitu persepsi, pola pikir, dan karakter masyarakat serta faktor-faktor eksternal seperti perilaku *gopla*, kondisi lingkungan, dan akses yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang *gopla* dan ekosistem hutan. Dari persepsi tersebut masyarakat menilai layak atau tidaknya untuk memanfaatkan lahan hutan. Dari sini, masyarakat memiliki niatan untuk mengelola lahan hutan dan akhirnya melakukan aktivitas pengelolaan hutan. Alur pemikiran masyarakat tersebut menjelaskan bahwa adaptasi suatu masyarakat dapat terjadi karena adanya faktor yang menekan untuk melakukan suatu perubahan. Tindakan tersebut tidak harus sesuai dari nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat, tindakan atau aksi tersebut dapat bertentangan dengan aturan atau kebiasaan masyarakat seperti yang terjadi pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, khususnya di Desa Tasikmadu.

Pengelolaan hutan dengan melakukan adaptasi untuk mencapai keselarasan, baik itu dari sudut pandang ekosistem hutan, sosial-budaya, dan sistem ekonomi dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka akan terus menyesuaikan diri atau beradaptasi sesuai dengan yang mereka butuhkan saat itu. Pola adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan dapat dilihat pada Gambar 6.

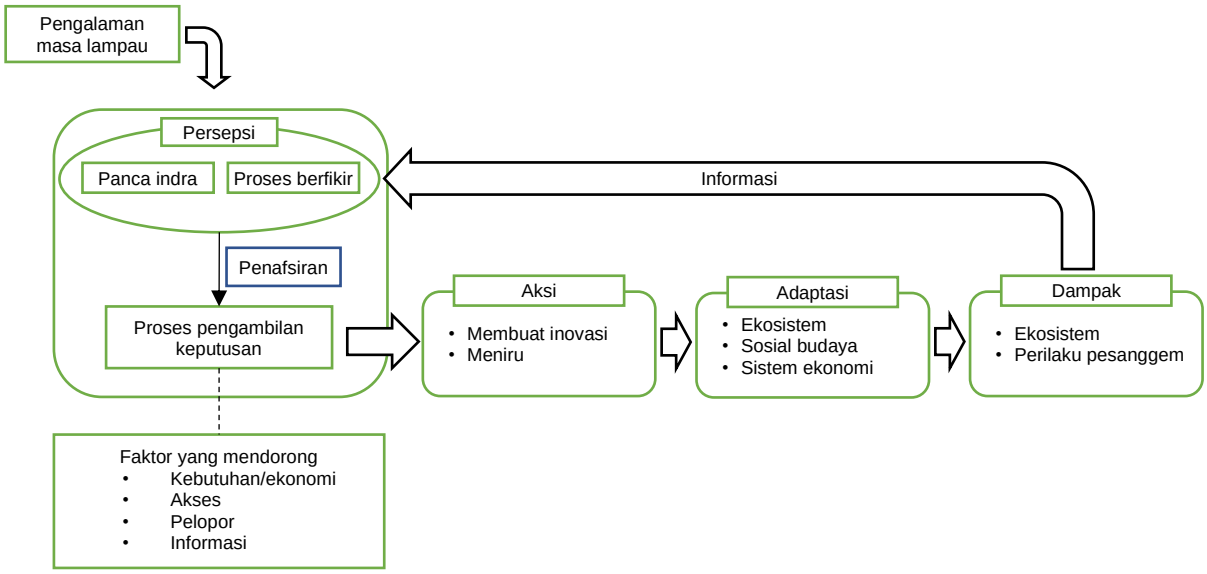

Gambar 6. Pola Adaptasi Masyarakat Pesisir Pengelola Hutan Dalam Fenomena Gopla

Berdasarkan Gambar 6, dirumuskan pola adaptasi masyarakat pesisir yang melakukan pengelolaan hutan. Pertama-tama proses adaptasi tersebut terjadi dari pengalaman masa lampau yang membentuk persepsi pada masyarakat. Dari persepsi tersebut mereka menafsirkan ekosistem hutan mampu menghasilkan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong, antara lain kebutuhan ekonomi, akses terhadap ekosistem, adanya pelopor yang digunakan sebagai panutan oleh masyarakat, dan informasi tentang ekosistem hutan. Selanjutnya hasil dari pengambilan keputusan ini menghasilkan sebuah aksi, dimana terdapat 2 (dua) jenis aksi yang terjadi, yaitu membuat inovasi atau sesuatu yang baru atau meniru teknologi dan cara pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lain. Dengan adanya aksi tersebut terjadi adaptasi yang berkaitan dengan ekosistem (pengelolaan hutan), sosial-budaya dan sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat. Dari adaptasi ini terdapat 2 (dua) dampak yaitu dampak secara ekosistem dan perilaku masyarakat yang kemudian membentuk informasi-informasi yang pada akhirnya kembali lagi membentuk persepsi masyarakat. Proses adaptasi tersebut terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Andri WP (2017) menjelaskan bahwa proses adaptasi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan masyarakat tidak hanya berhenti pada dampak baik atau buruk. Adakalanya dampak buruk terjadi pada suatu waktu dan di waktu yang lain justru berdampak baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi biasanya pemanfaatan hutan tersebut dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dalam pengelolaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini ternyata mendorong masyarakat pesisir melakukan adaptasi terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, dan sistem ekonominya. Adaptasi ini bertujuan untuk mempertahankan hidup serta untuk mencapai keselarasan dengan lingkungan

yang mereka tempati. Adaptasi yang terjadi pada masyarakat pesisir bersifat dinamis, dalam artian mereka akan selalu mengalami perubahan-perubahan atau beradaptasi tergantung pada kebutuhan yang mereka butuhkan pada waktu tertentu. Dari adaptasi-adaptasi yang mereka lakukan membentuk suatu pola adaptasi yang terus berjalan.

Saran

Memahami lebih lanjut adaptasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang berkaitan dengan perubahan perilaku, khususnya yang mengarah kepada perilaku menyimpang perlu pembahasan yang mendalam. Tindakan tersebut bisa saja merupakan upaya masyarakat untuk keluar dari tekanan hidup sehingga mereka berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang masih dapat mereka akses. Adanya stigma negatif perilaku menyimpang tanpa pemahaman menyeluruh tentang masyarakat dapat menyamarkan intisari dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Desa Tasikmadu merupakan salah satu yang melakukan adaptasi dengan melakukan perilaku menyimpang dimana hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka agar dapat bertahan dalam kondisi yang terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam proses penelitian. Selain itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pengurus LMDH dan masyarakat pengelola hutan yang bersedia meluangkan waktunya sebagai reponden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadin, A. (2009). *Ketika Lautku Tak Berikan Lagi*. Rayhan Intermedia.

Andri WP, Moch. (2017). Dampak Perubahan Fungsi Kawasan dan Pola Adaptasi Masyarakat di Kotawaringin Timur. Jurnal Handep, 1(1), 1-18.

Ariyono dan Siregar, A. (1985). Kamus Antropologi. In *Akademik Pressindo*. Akademika Pressindo.

Bainar, Hajjah, Rahman, Ruslan A., dan Anwar, M. J. (2006). Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar. Jakarta: Jenki Satria.

Bennett, J. W. (2017). *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation*. Pergamon Press Ltd. https://doi.org/10.4324/9781351304726.

Bordens, K. S., and Horowitz, I. A. (2008). *Social Psychology* (Third Edit). Freeload Press.

Campbell, T., (1981). *Seven Theories of Human Society,* Hardiman (penerjemah). Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan. 1994. Yogyakarta: Kanisius.

Chalcraft, S. E., Hansen, A., and Twiselton, S. (2008). *Doing Classroom Research: A Step-By-Step Guide for Student Teachers*. UK: McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books?id=4hnS1G_yb_MC&pgis=

Gallopin, G. C. (2006). Linkages Between Vulnerability, Resiliene and Adaptive Capacity. Global Environmental Change 16 (2006). Global environmental change. www.elsevier.com/locate/gloenvcha.

Hafizianor, Rezekiah, A. A., dan Rahmadi, A. (2016). Strategi Adaptasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Menghadapi Perubahan Alih Guna Kawasan Hutan Rawa Gambut Menjadi Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Kuala. Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Jilid 3, 961-967.

Iqbal, L. M., Dasir, Muh., dan Maulany, R. I. (2019). Respon Terhadap Konflik Oleh Masyarakat Komunitas Kontu Dalam Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 11(1), 33-40.

Johnson dan Doyle P. (1981). *Sosiological Theory,* Robert M. Z. Lawang (penerjemah), Teori Sosial Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia.

Listyana, Rohmaul dan Hartono, Y. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). Jurnal Agastya, 5(1), 118 – 138.

Marfai, M. A., Cahyadi, A., Krisnantara, G., dan Gustiar G. G. (2018). Analisis Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air di Pesisir Kabupaten Demak. https://doi.org/10.31227/osf.io/h6nws

Marten, G. G. (2003). Human Ecology - Basic Concepts for Sustainable Development. In *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 4(2). Earthscan. https://doi.org/10.1108/ijshe.2003.24904bae.004.

Miles, Matthew B., and Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Munthe, M. H. (2007). Modernisasi dan perubahan sosial masyarakat dalam pembangunan pertanian: suatu tinjauan sosiologis. *Harmoni Sosial*, *2*(1), 1–7.

Mustaqim. (2018). Adaptasi Komunitas Nelayan Terhadap Perubahan Ekosistem Kawasan Pesisir Pulau Sabang. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1).

Mustikawati, Aquari. (2018). Adaptasi Lingkungan Masyarakat Pendatang Dalam Cerita Rakyat Bontang. Jurnal Aksara Vol. 30 (1), 59-74.

Nababan, Abdon. (2004). Sejarah Penjarahan Hutan Nasional. *Intip Hutan*. Februari 2004. Hlm. 5–8.

Nurkhalis dan Zulfadhli. (2017). Perkembagnan Masyarakat Desa: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Gampong Jeumpeuk Kabupaten Aceh Jaya. Community, 3(1), 76-92.

Panjaitan, N. K., Galuh, A., Virianita, R., Karlita, N., dan Cahyani, R. I. (2016). Kapasitas Adaptasi Komunitas Pesisir pada Kondisi Rawan Pangan Akibat Perubahan Iklim (Kasus Sebuah Komunitas Nelayan di Jawa Barat. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 281-290.

Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Amalia R., dan Pandjaitan, N. K. (2018). Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi dan Ekologi Rumahtangga Petani di Daerah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di dua Desa di Kalimantan Tengah). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(2), 105-111.

Rasid, Abd., Malik, A., dan Alam, A. S. (2018). Manajemen Pengelolaan Hutan Pribadi di Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Jurnal Warta Rimba, 6(1), 65-72.

Ritzer, G dan Goodman, DJ. (2003). *Modern Sociological Theory*. Sixth Edition. Alimandan (Penerjemah). Teori Sosiologi Modern. (2004). Jakarta: Prenada Media.

Rohadi, T. T., Haryono, A. T., dan Paramita, P. D. (2016). Pengaruh Kemampuan Adaptasi dengan Lingkungan, Perilaku masyarakat dan Stres Kerja Terhadap Produktivitas yang Berdampak pada Kinerja Pemetik the (Studi kasus di Perkebunan The Medini Kabupaten Kendal. Journal of Management, 2(2).

Rossides, D. W. (1978). *The History and Nature of Sociological Theory*. Boston, Illinois: Houghton Mifflin Comp.

Safitri, M. A. (2012). *Keniscayaan Transdisiplinaritas dalam Studi Sosio-legal terhadap Hutan, Hukum dan Masyarakat*.

Salim, A. (2002). Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Smit, B. and Wandel, J. (2006). Adaptation, Adaptive Capacity and Global Environmental Change, 16, 282–292.

Sonya, E. R., Suwartapradja, O. S., Soemarwoto, R. S., dan Gunawan, B. (2019). Pola Adaptasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Setelah Penggenangan: Studi Kasus di Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang. Jurnal Papatung, 2(2), 63-76.

Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Susilo, E. (2007). *Daya Adaptasi dan Jaminan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Mencapai Ketahanan Pangan Domestik*. Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Susilo, E., Purwanti, P., dan Fattah, M. (2017). *Adaptasi Manusia, Ketahanan Pangan dan Jaminan Sosial Sumberdaya* (T. U. Press (Ed.)). UB Press.

Sutton, M. and A. (2010). Introduction to Cultural Ecology (2nd ed.) Lanham: Altmira Press.

Tamba, P. dan Manurung, R. (2015). *Adaptasi Masyarakat Dalam Merespon Perubahan Fungsi Hutan (Studi Deskriptif tentang Kehadiran Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari di Desa Tapian Nauli III, Kec. Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara)*. Perspektif Sosiologi, 3(1), 150-164.

Tim Project Cifor dan Fahutan UGM. (2007). Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM): Kolaborasi antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa. *Uni Eropa, CIRAD, CIFOR, UGM, Perum Perhutani*, 4.

Wijayanto, V., Suwatapradja, O. S., dan Hermawati, R. (2017). Perubahan Mata Pencaharian dan Proses Adaptasi Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology, 2(2), 66-77.

Wrong, D. (1970). *Max Weber, Makers of Modern Social Sciense*, Asnawi (penerjemah), Max Weber, Sebuah Khasanah. 2003. Yogyakarta: Ikon Teralitera: Kanisius.

Yuliati, Y. (2011). *Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger*. UB Press.